

Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2018-2023

Catur Wulandari¹, Indah Ainus Sofa², Moh Ardiansyah³, Sindy Nur Aisyah⁴,
Wahyu Isnu Sasongko⁵, Mega Tunjung Hapsari^{6*}

^{1,2,3,4,5}Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sayyid
Ali Rahmatullah Tulungagung

⁶Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah
Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kedungwati, Tulungagung, Indonesia

*Korespondensi penulis: ctrwln19@gmail.com

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the financial performance of the Kediri City government in 2018-2023. This research uses a quantitative approach with descriptive analysis methods. The data comes from Kediri City regional expenditure data for the 2018-2023 period, which was obtained through the Kediri City Central Statistics Agency and the Kediri City Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency. The data is processed using regional financial ratio analysis. This research shows that the average expenditure growth ratio of the Regional Government of Kediri City is not good because expenditure growth exceeds income, the average capital expenditure is 10.91% indicating good performance in regional development, the average percentage of operating expenditure is 85, This 45% shows that the operational expenditure performance of the City of Kediri during the 2018-2023 period showed good performance.*

Keywords: *Financial Performance; Expenditure Performance; Kediri City*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Kediri tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Data berasal dari data belanja daerah Kota Kediri periode 2018-2023, yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika Kota Kediri dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Data diolah menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Daerah Kota Kediri kurang baik karena pertumbuhan belanja melebihi pendapatan, rata-rata belanja modal adalah 10,91% menunjukkan kinerja yang baik dalam pengembangan wilayah, rata-rata persentase belanja operasi adalah 85,45% ini menunjukkan kinerja belanja operasi Kota Kediri selama periode 2018-2023 menunjukkan kinerja yang baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Kinerja Belanja; Kota Kediri

1. LATAR BELAKANG

Kinerja pendapatan dan belanja daerah merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat sepenuhnya bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa APBD digunakan secara ekonomi, efisien, dan akuntabel, guna menunjukkan kepada masyarakat bagaimana dana publik dikelola (Aulia & Rahmawaty, 2020).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan UU ini adalah untuk menekankan pentingnya otonomi dalam memastikan bahwa investasi publik dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan umum rakyat .dari iniUU dimaksudkan untuk menekankan pentingnya otonomi dalam memastikan bahwa investasi publik dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat .

Analisis belanja daerah menjadi penting untuk memahami alokasi anggaran dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Derajat desentralisasi juga turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah, di mana daerah dengan tingkat desentralisasi yang tinggi diharapkan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangannya.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan fleksibel, terutama dalam masa krisis seperti pandemi, menekankan perlunya evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal daerah.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sedang mengalami perkembangan dalam perekonomian dan infrastruktur yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan Kota Kediri sebagai objek penelitian analisis belanja daerah dengan didasari faktor tersebut

Berdasarkan analisis yang disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk mengetahui produktivitas keuangan Kota Kediri sebelum, selama , dan sesudah pandemi *COVID - 19* sepanjang tahun 2018–2023. Dipercaya penelitiannya dapat memberikan referensi bagi bidang ekonomi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan kemampuan analisis tentang proses kerja belanja suatu daerah. Diharapkan pemerintah daerah Kota Kediri dapat memberikan arahan yang menyeluruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kinerja Belanja Pemerintah Daerah

Kinerja belanja pemerintah daerah merujuk pada tingkat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2018). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana alokasi belanja memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara efisiensi menekankan pada pengelolaan anggaran yang hemat namun tetap menghasilkan output optimal (Mahmudi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan anggaran pemerintah daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditekankan oleh World Bank (1997), yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

2. Teori Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik seringkali didasarkan pada teori anggaran tradisional dan modern. Teori anggaran tradisional menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur, sedangkan teori modern, seperti *New Public Management* (NPM), lebih fokus pada hasil (*outputs*) dan dampak (*outcomes*) dari belanja publik (Hood, 1991).

Dalam pendekatan NPM, pemerintah diharapkan lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini relevan dengan penelitian ini, yang menilai kinerja belanja Pemerintah Kota Kediri berdasarkan realisasi anggaran, kualitas pelayanan publik, dan tingkat kepuasan masyarakat.

3. Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Indikator Fiskal

Kinerja belanja daerah sering dievaluasi menggunakan indikator seperti:

- a. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja: Mengukur prioritas belanja pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja rutin (Halim, 2021).
- b. Tingkat Penyerapan Anggaran: Mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana anggaran. Penyerapan rendah dapat menunjukkan lemahnya perencanaan atau kendala teknis di lapangan (Mahmudi, 2016).
- c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Mengukur dampak belanja pemerintah terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2023).

4. Perspektif *Good Governance*

Good governance berperan penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi hasil (*outcome orientation*) menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas belanja publik (UNDP, 1997).

Di Kota Kediri, penerapan prinsip-prinsip ini dapat diteliti melalui keterbukaan informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit oleh BPK memberikan ukuran akuntabilitas berdasarkan opini atas laporan keuangan daerah, yang memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah daerah (BPK, 2022).

5. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun dari hubungan antara konsep-konsep kinerja keuangan, teori pengelolaan anggaran, dan prinsip *good governance*. Dalam konteks ini, kinerja belanja Pemerintah Kota Kediri dianalisis berdasarkan hubungan antara indikator fiskal dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pengukuran Rasio Keuangan

Analisis Belanja Daerah

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

$$PB_{Th\ t} = \frac{Belanja_{Th\ t} - Belanja_{Th\ (t-1)}}{Belanja_{Th\ (t-1)}} \times 100\%$$

Penilaian dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan:

1. Pertumbuhan belanja \leq Pertumbuhan Pendapatan, berarti kinerja belanja baik
2. Pertumbuhan belanja \geq Pertumbuhan Pendapatan, berarti kinerja belanja kurang baik
(Mahmudi, 2010:160)

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

$$Rasio\ BMTB = \frac{Realisasi\ Belanja\ Modal}{Target\ Belanja\ Daerah} \times 100\%$$

Kriteria Rasio BMTB

Rasio BMTB $>$ 5%, berarti belanja operasi baik

Rasio BMTB $<$ 5%, berarti belanja operasi kurang baik (Mahmudi, 2010:164-165)

Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (BOTB)

$$\text{Rasio BOTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Persentase perbandingan belanja operasi dan total belanja daerah, antara 60% - 90%

Rasio BOTB \leq 90%, diartikan kinerja belanja operasinya baik

Rasio BMTB \geq 90%, diartikan kinerja belanja operasinya kurang baik

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menyajikan angka dan frekuensi sebagai wujud data dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019).

Data yang telah ditemukan akan diolah menggunakan analisis rasio kinerja. Data digunakan penelitian ini adalah dokumen-dokumen Kota Kediri Dalam Angka periode 2018—2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kota Kediri dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Penelitian ini mencakup prosedur dokumentasi berupa data laporan belanja daerah Kota Kediri dari Badan Pusat Statistika Kota Kediri dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

Tabel 1. Analisis Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2018 – 2023

Tahun	Belanja (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan (%)	Pertumbuhan Belanja (%)	Kinerja
2018	1.237.745.256,86	3,17%	-2.53%	Baik
2019	1.312.905.390,35	4,76%	6,07%	Kurang Baik
2020	1.207.691.610,98	-4,20%	-8,01%	Kurang Baik
2021	1.344.272.318,95	13,28%	11,30%	Baik
2022	1.482.748.596,78	3,80%	10,30%	Kurang Baik

2023	1.558.794.618,26	-2,03%	5,12%	Kurang Baik
Rata – rata	1.357.359.632,03	3,13%	3,70%	Kurang Baik

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1. di atas, dapat dilihat adanya tren pertumbuhan pada pendapatan daerah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 3,13%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan daerah. Namun, jika kita melihat pertumbuhan belanja daerah, terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan pendapatan dan belanja. Pertumbuhan belanja rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan, yaitu sebesar 3,70%. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pertumbuhan belanja yang lebih tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dapat berpotensi menimbulkan defisit anggaran dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kinerja yang tertera pada tabel menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mana kinerja dinilai baik dan kurang baik secara bergantian. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan efektif. Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah Kota Kediri. Namun, pertumbuhan belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan serta penilaian kinerja yang fluktuatif mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan menyusun strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kriteria penilaian kinerja yang digunakan agar lebih objektif dan relevan dengan kondisi daerah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 2. Rasio BMTB Kota Kediri Tahun 2018 – 2023

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Kinerja
2018	133.226.151,03	1.237.745.256,86	10,78	Baik

2019	182.759.961,09	1.312.905.390,35	13,92	Baik
2020	98.314.709,09	1.207.691.610,98	8,14	Baik
2021	106.605.344,50	1.344.272.318,95	7,93	Baik
2022	169.119.298,48	1.482.748.596,78	11,41	Baik
2023	198.153.723,02	1.558.794.618,26	12,71	Baik
Rata – rata	148.029.864,54	1.357.359.632,03	10,91	Baik

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 2.dapat diartikan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun kemarin rasio belanja modal mengalami penurunan dan kenaikan. Dari 10,78% ditahun 2018 menjadi 13,92% di tahun 2019. Kemudian awal–awal Covid-19 turun drastis dari 13,92% di tahun 2019 menjadi 7,93% ditahun 2021. Mulai bangkit tahun 2022 yaitu 11,41% menjadi 12,71% ditahun 2023. Rasio belanja modal terhadap total belanja di Kota Kediri selama jangka waktu 2018-2023 kinerjanya baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio BMTB 10,91% lebih besar dari 5%. Kinerja BMTB Kota Kediri telah menjalankan proses investasi untuk pengembangan wilayah tersebut selama lima tahun terakhir .Saat ini kinerja Kota Kediri lebih banyak difokuskan pada investasi pengembangan lahan.

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tabel 3. Rasio BOTB Kota Kediri Tahun 2018 – 2023

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja (Rp)	BOTB (%)	Kinerja
2018	975.920.774,50	1.237.745.256,86	78,85%	Baik
2019	994.700.983,86	1.312.905.390,35	75,76%	Baik
2020	881.979.377,25	1.207.691.610,98	73,03%	Baik
2021	1.205.523.929,89	1.344.272.318,95	89,68%	Baik
2022	1.305.116.487,31	1.482.748.596,78	88,02%	Baik
2023	1.352.195.813,69	1.558.794.618,26	86,75%	Baik
Rata – rata	1.119.239.561,08	1.357.359.632,03	82,45%	Baik

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kemarin rasio belanja operasional mengalami penurunan dan kenaikan. Dari 78,85% ditahun 2018 menjadi 75,76% di tahun 2019. Kemudian awal–

awal Covid turun dari 75,76% di tahun 2019 menjadi 73,03% ditahun 2020. Mengalami kenaikan yang tinggi tahun 2021 yaitu 89,68% dan menjadi 88,02% ditahun 2022. Selanjutnya tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 2% menjadi 86,75%. Rasio belanja operasi terhadap total belanja di Kota Kediri selama jangka waktu 2018-2023 kinerjanya baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio BOTB Kota Kediri dari tahun 2018-2023 adalah 82,45% lebih kecil dari 90%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu : 1) Dilihat dari rata-rata analisis rasio pertumbuhan belanjanya kurang baik, dikarenakan pertumbuhan belanja Kota Kediri dari tahun 2018-2023 lebih tinggi dari pada pendapatannya. 2) Dilihat dari rata-rata belanja modalnya adalah baik yaitu 10,91%. Kinerja BMTB Kota Kediri tahun 2018-2023 ini masih dalam proses untuk pembangunan wilayah. 3) Dilihat dari rata-rata belanja operasi Kota Kediri selama periode 2018-2023 adalah baik yaitu diangka 82,45% dimana itu lebih kecil dari 90%.

Saran untuk penelitian selanjutnya supaya menambahkan rasio analisis keuangan agar lebih tergambar dengan jelas kinerja pemerintahan dalam mengelola anggaran. Penelitian lain juga bisa meneliti kinerja pajak daerahnya. Untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, dalam penelitian ini hanya mencakup salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Kediri.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Tahun 2018-2023. Jakarta: BPS.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: BPK RI.
- Fitra, H., dan Efendi,Z., (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah KABUPATEN Solok Selatan. *Jurnal Menara Ilmu*, 14(10), 51-62. <https://doi.org/10.31869/mi.v14i1.1858>.
- Halim, A. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>

- Kartika, D., & Kusuma, I. (2016). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Sosial Humaniora*, 7(2), 143–151. <https://doi.org/10.30997/jakd.v1i2.77>.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Mengambil Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Rachmawati, Tri. dan Nur Handayani. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 12(11) : 2. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5597>.
- Rolianah, W. S., Mulyani, S., & Hasyim, M. R. (2021). Analisis manajemen risiko imbal hasil perbankan syariah di era pandemi COVID-19. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 129-140. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v7i2.910>.
- Selvi, N. M., dan Mega T.H. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi Covid-19 (Tahun 2017-2022). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing (JAKA)*. 4(1), 205-114. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Susanto, Hery. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Zukhri, N. (2020). Kinerja keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditinjau dari derajat kemandirian, ketergantungan, dan desentralisasi fiskal. *Indonesian*

Treasury Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 148. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.213>.

World Bank. (1997). *World Development Report 1997: The State in a Changing World*. Washington, DC: World Bank.